

Perempuan dan Lahan Gambut

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Lahan Gambut

Artikel

Membumikan Ekofeminisme dalam Restorasi Gambut: Kebijakan, Aksi, dan Tantangan

Myrna Asnawati Safitri

Perempuan Bertarung dengan Api di Lahan Gambut: Pengalaman Perempuan Desa di Provinsi Kalimantan Tengah dan Riau

Catharina Indirastuti

Ketika Purun Menjauh: Pengalaman Perempuan di Kawasan Gambut Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan

Enik Maslahah

Tanaman Purun dan Realita Pahit Perjuangan Perempuan di Lahan Gambut

Taqiuddin Ibnu Syihab, Yustina Ambarini Murdiningrum, Lukas Rumboko Wibowo

Aksi Perempuan Fasilitator Desa dalam Revitalisasi Ekonomi Kelompok Perempuan di Desa Gambut: Studi Kasus 3 Desa di Kalimantan Tengah

Nur Iman Subono, Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina Boangmanalu

Diterbitkan oleh:

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 36/E/KPT/2019

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **www.jurnalperempuan.org**

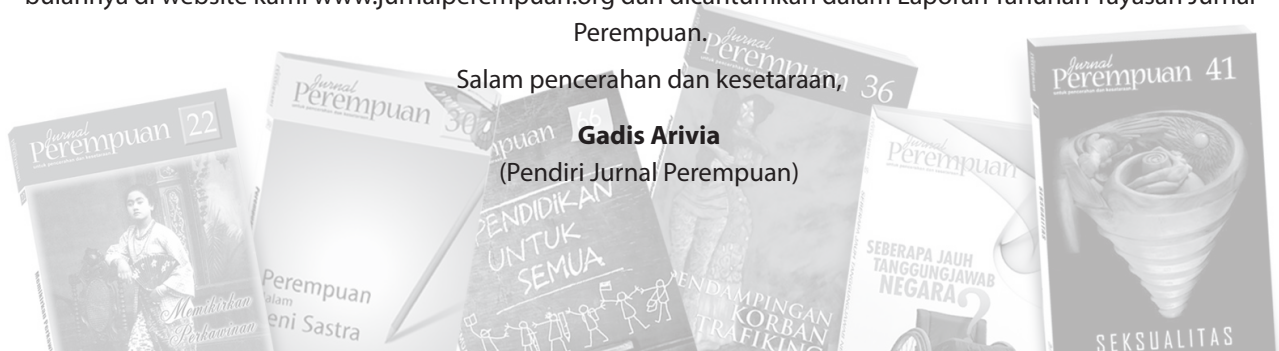
Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295,
email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

DIREKTUR & PEMIMPIN REDAKSI

Dr. Atnike Nova Sigiro

DEWAN REDAKSI

Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universiteit van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Dr. Andi Achdian (Sejarah & Sosiologi, Universitas Nasional)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Former Regional Representative Ford Foundation Jakarta)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Dr. (iur) Asmin Fransiska, SH, LLM (Hukum & Hak Asasi Manusia, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta)
Dr. Irene Hadiprayitno (Hak Asasi Manusia & Hubungan Internasional, Leiden University)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universiteit Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)
Dr. Widjajanti M Santoso (Gender, Sosiologi & Media, Indonesian Institute of Sciences)
Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Hukum & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Bagus Takwin (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Ikhaputri Widiyanti, M. Si. (Filsafat dan Feminisme, Universitas Indonesia)
Elisabet Kuswijayanti M.Si. (Ekologi dan Gender)
Francisca Saveria Sika Ery Seda, Ph.D. (Sosiologi, Gender & Kemiskinan, Universitas Indonesia)
Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sejarah, Gender & Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)
Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen and Feminisme, Appalachian State University, USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIS REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu

REDAKSI

Dewi Komalasari

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Andri Wibowo

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org
indonesianfeministjournal.org

Cetakan Pertama, Februari 2020

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Lahan Gambut/ *Women and Peatlands* iii

Artikel

- Membedakan Ekofeminisme dalam Restorasi Gambut: Kebijakan, Aksi, dan Tantangan/ *Manifesting Ecofeminism in Peatland Restoration: Policies, Actions, and Challenges* 1-12
Myrna Asnawati Safitri
- Perempuan Bertarung dengan Api di Lahan Gambut: Pengalaman Perempuan Desa di Provinsi Kalimantan Tengah dan Riau/ *Women Fighting Peatland Fire: Rural Women's Experiences in Central Kalimantan and Riau Provinces* 13-24
Catharina Indirastuti
- Ketika Purun Menjauh: Pengalaman Perempuan di Kawasan Gambut Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan/ *Being Away from Purun: Women's Experiences in Peatland Area of Hulu Sungai Utara, South Kalimantan* 25-35
Enik Maslahah
- Tanaman Purun dan Realita Pahit Perjuangan Perempuan di Lahan Gambut/ *Purun and The Bitter Realities of Women's Struggle in Peatland Areas* 37-45
Taqiyuddin Ibnu Syihab, Yustina Ambarini Murdiningrum, Lukas Rumboko Wibowo
- Aksi Perempuan Fasilitator Desa dalam Revitalisasi Ekonomi Kelompok Perempuan di Desa Gambut: Studi Kasus 3 Desa di Kalimantan Tengah/ *Women Village Facilitator Action on Economic Revitalization of the Women's Group: A Case Study in 3 peatland villages, Central Kalimantan* 47-61
Nur Iman Subono, Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina Boangmanalu

Perempuan dan Lahan Gambut

Women and Peatlands

Indonesia memiliki lahan gambut dengan luas mencapai 22,5 juta hektar. Ia menyumbang 47% luas lahan gambut di wilayah tropis dan merupakan negara dengan lahan gambut terluas di Asia Tenggara. Oleh sebab itu keberadaan lahan gambut di Indonesia memiliki arti penting bagi kelestarian lingkungan secara global. Sayangnya, wacana seputar lahan gambut masih muncul terbatas pada situasi tertentu seperti saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan (*karhutla*). Wacana lahan gambut yang muncul pun umumnya berfokus pada persoalan ekologi dan ekonomi, padahal keberadaan lahan gambut memiliki dimensi luas, baik dari segi sosial, budaya, politik, bahkan dalam dimensi keadilan gender. Dengan luasnya kawasan lahan gambut di Indonesia, maka jelas bahwa lahan gambut memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat, khususnya penduduk yang hidup di sekitar kawasan lahan gambut, termasuk di dalamnya kaum perempuan.

Persoalan lahan gambut sebagai persoalan lingkungan secara global telah cukup lama dibahas, setidaknya sejak diadopsinya *the Ramsar Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat* (Konvensi Ramsar) di kota Ramsar, Iran, pada tahun 1971. Konvensi Ramsar telah menekankan pentingnya pencegahan kerusakan, pencegahan hilangnya lahan basah, serta pentingnya pelestarian lahan basah sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan. Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Ramsar pada tahun 1991. International Union for Conservation of Nature (IUCN) menyebutkan lahan gambut sebagai ekosistem bumi yang sangat berharga karena fungsinya dalam pelestarian keragaman hayati, sebagai sumber air, pencegahan banjir, dan untuk mengatasi perubahan iklim.

Ekofeminisme secara umum melihat akar dari kerusakan terhadap alam dan penindasan terhadap perempuan sebagai akibat dari dominasi patriarki. Sebagaimana pandangan Karen J. Warren, cara pandang patriarki yang hierarkis dan opresif telah menindas alam dan perempuan. Kerusakan kawasan lahan gambut di Indonesia telah terjadi sejak zaman Orde Baru seperti salah satunya adalah *Rice Mega Project* yang mengubah lahan gambut di Kalimantan menjadi lahan persawahan. Pembangunan yang agresif dan juga bencana seperti kebakaran lahan dan hutan yang telah berjalan selama puluhan tahun tersebut telah berakumulasi dan menjadi warisan persoalan kawasan lahan gambut di Indonesia yang kita hadapi hingga hari ini.

Karhutla besar yang terjadi di Indonesia pada medio 2015 merupakan peringatan dan penanda penting atas ancaman terhadap kawasan lahan gambut di Indonesia. Hal ini ditandai dengan pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2016. BRG merupakan sebuah lembaga non-struktural di bawah Presiden yang diberi mandat untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi kawasan lahan gambut di tujuh provinsi, yaitu: Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan, dan Papua. Konsep restorasi lahan gambut yang dijalankan oleh BRG mengakui bahwa pemulihan tanah tidak dapat dilakukan hanya dalam dimensi ekologis-geologis, tetapi juga dalam dimensi pemulihan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem lahan gambut. Konsekuensinya maka kaum perempuan juga harus menjadi penerima manfaat dan sekaligus agen dalam proses restorasi tersebut.

Perempuan memiliki kepentingan yang besar akan kelestarian lingkungan. Maria Mies dan Vandana Shiva, pemikir dan aktivis ekofeminisme, berargumen bahwa perempuan memiliki kepentingan yang besar terhadap kelestarian lingkungan. Hal

ini disebabkan oleh peran gender yang dibebankan kepada perempuan dalam pengasuhan dan pengelolaan kehidupan sehari-hari. Sehingga, agar dapat memberikan nutrisi yang cukup bagi anak dan/atau keluarga, memperoleh air yang bersih, dan berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya, maka perempuan memiliki kepentingan akan ketersediaan dan kelestarian sumber daya alam seperti air, udara, lahan, serta flora dan fauna.

Kaum perempuan yang hidup di kawasan lahan gambut merupakan gambaran yang jernih tentang hubungan antara kerusakan lingkungan dan akibatnya terhadap perempuan. Salah satu budaya dan ekonomi lokal di kawasan lahan gambut di Kalimantan adalah anyaman purun (purun adalah sejenis rumput yang tumbuh di lahan gambut dan sering digunakan sebagai bahan anyaman). Keterampilan menganyam purun umumnya dilakukan oleh perempuan, dan dilakukan di sela-sela waktu peran pengasuhan di dalam rumah tangga atau keluarga. Rusaknya lahan gambut menyebabkan hilangnya purun yang tumbuh bebas di sekitar desa. Ketika purun tidak lagi tumbuh di sekitar desa, maka perempuan pengrajin purun harus mencari purun jauh keluar desa, atau harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli purun untuk bahan baku pembuatan anyaman.

Bencana karhutla di kawasan lahan gambut telah menyebabkan kerugian ekonomi dan trauma terhadap penduduk. Perempuan adalah kelompok yang merasakan dampak langsung karhutla dalam kehidupan sehari-hari, seperti keringnya sumber air, rusaknya kebun, dan hilangnya sumber daya hayati lokal seperti ikan. Namun demikian, program-program pencegahan karhutla masih cenderung mengabaikan perempuan. Padahal ketika kebakaran terjadi, perempuan juga turut memadamkan api baik di lahan perkebunan maupun di pemukiman. Perempuan juga harus memikirkan dampak lanjutan dari karhutla terhadap kehidupan keluarga. Misalnya, kaum perempuan harus mencari cara mencegah asap masuk ke dalam rumah, atau merawat anggota keluarga yang sakit akibat asap ketika terjadi karhutla.

Pengalaman kerusakan lahan gambut dan akibatnya terhadap masyarakat dan perempuan menguatkan argumen ekofeminis seperti Ynestra King. King berpandangan bahwa kerusakan dan/atau penindasan yang terjadi terhadap manusia berakar dari relasi yang hierarkis dan timpang. Sebagaimana relasi kuasa yang timpang antara laki-laki terhadap perempuan, akibat yang kita rasakan dari rusaknya kawasan lahan gambut, karhutla, bencana asap, dan lainnya, juga menggambarkan relasi kuasa dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan gambut selama ini.

Namun, ekofeminisme tidak berhenti pada argumen akan keterkaitan antara eksploitasi terhadap alam dengan dominasi terhadap perempuan. Ekofeminisme juga melihat agensi perempuan dalam memulihkan dan menjaga kelestarian lingkungan. Pengalaman perempuan fasilitator desa di Desa Peduli Gambut memperlihatkan keberdayaan diri yang politis perempuan untuk mencari jalan keluar dalam menghadapi tantangan struktural dan kultural dalam proses restorasi gambut. Ekofeminisme menawarkan perubahan dalam cara pandang manusia yang superior terhadap alam melalui kacamata keadilan gender. Ajakan yang sama diajukan melalui pengetahuan yang dihadirkan dari pengalaman kaum perempuan, serta upaya mereka untuk memulihkan dan memelihara lahan gambut, di dalam edisi Jurnal Perempuan kali ini. Selamat membaca!

(Atnike Nova Sigi)

Myrna Asnawati Safitri (Badan Restorasi Gambut dan Universitas Pancasila, DKI Jakarta, Indonesia)

Membumikan Ekofeminisme dalam Restorasi Gambut: Kebijakan, Aksi, dan Tantangan

Manifesting Ecofeminism in Peatland Restoration: Policies, Actions, and Challenges

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 1, Februari 2020, hal. 1-12, 24 daftar pustaka

Degradation of peatland ecosystems occurs as a result of excessive exploitation leading to peat drainage and fires. This was influenced by a masculinity perspective in resource tenure and utilization. Ecofeminism presents a different perspective on narratives and inter-relationships of human with nature, including the place of women in them. Injustice that befalls women occur due to unequal power relations in the control and utilization of resources in the peatland ecosystem. This paper discusses the Government of Indonesia's efforts to reduce gender injustice through Peatland Restoration's policy. Two policies are discussed here, namely the Social Safety Safeguard and Peat Cares Village Program. It is concluded that women's participation must be able to resolve the imbalance of power relations among women as well as between gender. This requires sufficient time and everlasting education.

Keywords: ecofeminism, power relation, peatland, peatland restoration.

Kerusakan ekosistem gambut terjadi akibat eksploitasi berlebihan sehingga menyebabkan kekeringan dan kebakaran. Hal ini dipengaruhi pandangan maskulinitas pada penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Ekofeminisme hadir memberi cara pandang lain terhadap narasi dan relasi manusia dengan alam, termasuk tempat perempuan di dalamnya. Ketidakadilan yang menimpa perempuan terjadi karena relasi kuasa yang tidak berimbang dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya di ekosistem gambut. Tulisan ini mendiskusikan upaya Pemerintah Indonesia untuk mengurangi ketidakadilan gender melalui kebijakan Restorasi Gambut. Terdapat dua kebijakan yang dibahas yaitu Kerangka Pengaman Sosial dan Program Desa Peduli Gambut. Disimpulkan bahwa partisipasi perempuan sejatinya juga harus mampu menyelesaikan ketidakseimbangan relasi kuasa antar perempuan selain antar gender. Untuk ini diperlukan waktu yang cukup serta edukasi yang terus-menerus.

Kata kunci: ekofeminisme, relasi kuasa, gambut, restorasi gambut.

Catharina Indirastuti (Kemitraan-Partnership for Governance Reform, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan)

Perempuan Bertarung dengan Api di Lahan Gambut: Pengalaman Perempuan Desa di Provinsi Kalimantan Tengah dan Riau

Women Fighting Peatland Fire: Rural Women's Experiences in Central Kalimantan and Riau Provinces

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 1, Februari 2020, hal. 13-24, 1 grafik, 9 daftar pustaka

Forest and land fire that repeatedly destroyed million hectares of peatland in Indonesia is a result of unsustainable peatland governance for many years. Rural women and men living in peatland have different experiences with forest and land fire. Intersectionality between gender

and class, geographical location, and ethnicity further add nuances to these different experiences. This article explores women experiences in fighting peat forest and land fire in 3 target villages of Peat Care Village Program led by Peat Restoration Agency in Central Kalimantan and Riau. Power network that women must endure and a priori on gendered roles and responsibilities weaken women's position in fighting peatland fire. Women do not have access to resources given to prevent and fight against forest and land fire, while in reality fire-fighting activities require women's involvement especially when it happened in their land or living space. Women experiences in facing peat forest and land fire is reflected using feminist political ecology approach to highlight the multiple impacts that women experience.

Keywords: forest and land fire, intersectionality, peatland villages, women's access.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang kali membakar jutaan hektar lahan gambut di Indonesia merupakan akibat dari tata kuasa dan tata kelola lahan gambut yang tidak berkelanjutan selama puluhan tahun. Perempuan dan laki-laki di wilayah gambut perdesaan memiliki penghayatan yang berbeda mengenai karhutla. Interseksionalitas antara gender dengan kelas, lokasi geografis, dan suku turut mewarnai perbedaan pengalaman yang dirasakan. Artikel ini menelusuri pengalaman perempuan dalam penanggulangan karhutla di 3 desa dampingan Badan Restorasi Gambut dalam Program Desa Peduli Gambut di Provinsi Kalimantan Tengah dan Riau. Jaringan relasi kuasa yang melingkupi kehidupan perempuan dan *a priori* atas peran dan tanggung jawab yang digenderkan melemahkan posisi perempuan menghadapi karhutla. Perempuan tidak memiliki akses atas sumber daya untuk pencegahan dan penanggulangan karhutla, sementara aktivitas penanggulangan karhutla menuntut keterlibatan perempuan karena terjadi di ruang hidup perempuan. Pengalaman perempuan menghadapi karhutla direfleksikan dengan pendekatan ekologi politik feminis untuk melihat dampak berlapis yang dialami perempuan.

Kata kunci: kebakaran hutan dan lahan, interseksionalitas, desa gambut, akses perempuan.

Enik Maslahah (Badan Restorasi Gambut (BRG), Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan)

Ketika Purun Menjauh: Pengalaman Perempuan di Kawasan Gambut Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan

Being Away from Purun: Women's Experiences in Peatland Area of Hulu Sungai Utara, South Kalimantan

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 1, Februari 2020, hal. 25-35, 4 tabel, 10 daftar pustaka

Purun is a typical plant that grow in peatland area that has important functions for people living in peatland area. The availability of purun is now decreasing due to changes in land management and environmental destruction. Almost all of the plantation commodities in the peatlands area, management of peatlands in the forestry, agriculture, plantation and fisheries sectors apply exploitative and pragmatic methods, while ignoring environmental sustainability. Furthermore, environmental damage also occurs due to disasters such as forest and land fires that often occur in peatland areas in Indonesia. One of the damages happen to peatland area is the damage and scarcity of purun. As users and beneficiaries of purun, women become the affected group that face the impact of peatland destruction. This paper describes the experiences and efforts of women in peatland areas to restore land and restore the existence of purun in their villages.

Keywords: women and peatland, purun, peatland restoration.

Purun adalah salah satu tanaman khas yang hidup di kawasan lahan gambut yang memiliki fungsi bagi masyarakat di kawasan lahan gambut. Keberadaan purun saat ini mulai berkurang akibat perubahan tata kelola lahan dan kerusakan lingkungan. Sebagian besar komoditas perkebunan di kawasan lahan gambut, pengelolaan lahan gambut di sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, dan perikanan dikelola dengan cara eksploitatif dan pragmatis, sementara kurang menghiraukan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, kerusakan lingkungan juga terjadi akibat bencana seperti kebakaran hutan dan lahan yang masih sering terjadi di kawasan lahan gambut di Indonesia. Salah satu kerusakan yang terjadi terhadap kawasan lahan gambut adalah kerusakan dan kelangkaan tanaman purun. Sebagai pengelola dan pemanfaat purun, perempuan menjadi kelompok terdampak yang menghadapi dampak kerusakan lahan gambut. Tulisan ini memaparkan pengalaman dan upaya perempuan di kawasan lahan gambut untuk merestorasi lahan dan mengembalikan keberadaan purun di desa mereka.

Kata Kunci: perempuan dan lahan gambut, purun, restorasi gambut.

¹Taqiyuddin Ibnu Syihab, ²Yustina Ambarini Murdiningrum, ³Lukas Rumboko Wibowo (^{1,2}Epistema Institute, ³P3SEKPI, DKI Jakarta, Indonesia)

Tanaman Purun dan Realita Pahit Perjuangan Perempuan di Lahan Gambut

Purun and The Bitter Realities of Women's Struggle in Peatland Areas

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 1, Februari 2020, hal. 37-45, 2 gambar, 21 daftar pustaka

This paper aims to examine the elimination process of traditional conservation that has been built for many years by women on peatlands. This article reveals the struggle and multiple burdens of women in conservation, to do reproductive and productive work in the midst of clashing interests in peatland area. Research conducted shows that there is a shift in the mode of production from subsistence toward exploitative hegemony by capitalistic interests, as a product of modern scientific knowledge. Corporations compete for peatland areas to accumulate endless capital which then threatens the purun and the purun weaving community of women. This has not only led to degradation of the purun ecosystem but also the loss of source of life and cultural identity for the purun weaving community. From an ecofeminist perspective, investment policies and regimes with minimum controls have systematically destroyed peat ecosystems, resulting in economic powerlessness and impoverishment of women.

Keywords: purun, women and natural resources, women and peatlands

Tulisan ini mengkaji proses penyingkiran terhadap konservasi tradisional yang telah terbangun secara bertahun-tahun oleh kaum perempuan di lahan gambut. Artikel ini mengungkapkan pergolatan dan multi beban perempuan dalam konservasi, melakukan pekerjaan reproduktif dan produktif di tengah-tengah semakin derasnya perebutan dan klaim kepentingan atas lahan gambut. Penelitian yang dilakukan memperlihatkan adanya pergeseran mode produksi dari subsistensi menuju ke arah eksploitatif yang terhegemoni oleh kepentingan yang kapitalistis, sebagai produk dari ilmu pengetahuan modern. Korporasi memperebutkan lahan gambut untuk akumulasi kapital yang menjadi ancaman bagi purun dan komunitas perempuan penganyam purun. Akibatnya, komunitas penganyam purun tidak hanya kehilangan sumber kehidupan dan ekosistem purun tetapi juga identitas budaya mereka. Perspektif ekofeminis memandang bahwa

kebijakan dan rezim investasi dengan kontrol minimum secara sistematis telah menghancurkan ekosistem gambut, yang mengakibatkan ketidakberdayaan ekonomi dan pemiskinan perempuan.

Kata kunci: purun, perempuan dan sumberdaya alam, perempuan dan lahan gambut

¹Nur Iman Subono, ²Andi Misbahul Pratiwi, ²Abby Gina
(¹Departemen Ilmu Politik, Universitas Indonesia & ²Jurnal Perempuan, DKI Jakarta)

Aksi Perempuan Fasilitator Desa dalam Revitalisasi Ekonomi Kelompok Perempuan di Desa Gambut: Studi Kasus 3 Desa di Kalimantan Tengah

Women Village Facilitator Action on Economic Revitalization of the Women's Group: A Case Study in 3 peatland villages, Central Kalimantan

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 1, Februari 2020, hal. 47-61, 1 tabel, 2 grafik, 17 daftar pustaka

Peatlands play an important role in the ecological and economic aspects. Peatlands degradation in various regions in Indonesia brings economic issues, especially for women. The involvement of women in the peatland restoration program as a strategy needs to be reviewed. This research focuses on the involvement of women in the peatland restoration as a village facilitator, mainly on aspects of economic revitalization. This research focuses in 3 Villages in Central Kalimantan Province, Jabiren Village, Tumbang Nusa Village, and Gandang Barat Village. The main question of this research is how are the actions, challenges, and strategies experienced by women as village facilitators in the Desa Peduli Gambut program. Based on in-depth interviews with relevant actors and literature studies, this research finds, 1) the economic revitalization program conducted by women village facilitators build the economic resilience of rural women communities and changes the gender relations; 2) women village facilitators faced structural and cultural obstacles in their action; 3) the program is also the part of political actions for peatlands preservation.

Keyword: women village facilitator, peatlands restoration, economic revitalization, power

Lahan gambut memainkan peran penting dalam aspek ekologi dan ekonomi. Degradasi lahan gambut di berbagai daerah di Indonesia membawa masalah ekonomi masyarakat, terutama bagi perempuan. Pelibatan perempuan dalam restorasi lahan gambut menjadi salah satu strategi yang patut ditinjau. Penelitian ini berfokus pada keterlibatan perempuan dalam restorasi lahan gambut sebagai fasilitator desa, terutama perannya pada revitalisasi ekonomi desa. Penelitian ini berfokus pada perempuan fasilitator desa di 3 desa di Provinsi Kalimantan Tengah yakni Desa Jabiren, Desa Tumbang Nusa, dan Desa Gandang Barat. Pertanyaan utama dari penelitian ini adalah bagaimana tindakan, tantangan, dan strategi yang dialami oleh perempuan sebagai fasilitator desa dalam program Desa Peduli Gambut. Berdasarkan wawancara mendalam dengan aktor-aktor dan studi literatur yang relevan, penelitian ini menemukan bahwa 1) program revitalisasi ekonomi yang dilakukan oleh perempuan fasdes membawa dampak terhadap ketahanan ekonomi perempuan pedesaan dan perubahan relasi gender di dalam keluarga; 2) perempuan fasilitator desa mengalami hambatan struktural dan kultural dalam aksinya; 3) program yang dikembangkan perempuan fasdes merupakan bagian dari aksi politik untuk pelestarian lahan gambut.

Kata kunci: perempuan fasilitator desa, restorasi lahan gambut, revitalisasi ekonomi, kekuasaan

Aksi Perempuan Fasilitator Desa dalam Revitalisasi Ekonomi Kelompok Perempuan di Desa Gambut: Studi Kasus 3 Desa di Kalimantan Tengah

Women Village Facilitator Action on Economic Revitalization of the Women's Group: A Case Study in 3 peatland villages, Central Kalimantan

¹Nur Iman Subono, ²Andi Misbahul Pratiwi, dan ²Abby Gina

¹Departemen Ilmu Politik, Universitas Indonesia & ²Jurnal Perempuan
Jalan Karang Pola Dalam II, No. 9A, Jatipadang-Pasar Minggu, Jakarta Selatan

boni.subono@gmail.com, pratiwiandi@jurnalperempuan.com, abbygina@jurnalperempuan.com

Kronologi Naskah: diterima 19 April 2020, direvisi 21 April 2020, diputuskan diterima 23 April 2020

Abstract

Peatlands play an important role in the ecological and economic aspects. Peatlands degradation in various regions in Indonesia brings economic issues, especially for women. The involvement of women in the peatland restoration program as a strategy needs to be reviewed. This research focuses on the involvement of women in the peatland restoration as a village facilitator, mainly on aspects of economic revitalization. This research focuses in 3 Villages in Central Kalimantan Province, Jabiren Village, Tumbang Nusa Village, and Gandang Barat Village. The main question of this research is how are the actions, challenges, and strategies experienced by women as village facilitators in the Desa Peduli Gambut program. Based on in-depth interviews with relevant actors and literature studies, this research finds, 1) the economic revitalization program conducted by women village facilitators build the economic resilience of rural women communities and changes the gender relations; 2) women village facilitators faced structural and cultural obstacles in their action; 3) the program is also the part of political actions for peatlands preservation.

Keyword: women village facilitator, peatlands restoration, economic revitalization, power

Abstrak

Lahan gambut memainkan peran penting dalam aspek ekologi dan ekonomi. Degradasi lahan gambut di berbagai daerah di Indonesia membawa masalah ekonomi masyarakat, terutama bagi perempuan. Pelibatan perempuan dalam restorasi lahan gambut menjadi salah satu strategi yang patut ditinjau. Penelitian ini berfokus pada keterlibatan perempuan dalam restorasi lahan gambut sebagai fasilitator desa, terutama perannya pada revitalisasi ekonomi desa. Penelitian ini berfokus pada perempuan fasilitator desa di 3 desa di Provinsi Kalimantan Tengah yakni Desa Jabiren, Desa Tumbang Nusa, dan Desa Gandang Barat. Pertanyaan utama dari penelitian ini adalah bagaimana tindakan, tantangan, dan strategi yang dialami oleh perempuan sebagai fasilitator desa dalam program Desa Peduli Gambut. Berdasarkan wawancara mendalam dengan aktor-aktor dan studi literatur yang relevan, penelitian ini menemukan bahwa 1) program revitalisasi ekonomi yang dilakukan oleh perempuan fasdes membawa dampak terhadap ketahanan ekonomi perempuan pedesaan dan perubahan relasi gender di dalam keluarga; 2) perempuan fasilitator desa mengalami hambatan struktural dan kultural dalam aksinya; 3) program yang dikembangkan perempuan fasdes merupakan bagian dari aksi politik untuk pelestarian lahan gambut.

Kata kunci: perempuan fasilitator desa, restorasi lahan gambut, revitalisasi ekonomi, kekuasaan

Latar Belakang

Pemertahanan lahan gambut dalam konteks Indonesia menjadi sangat penting bukan hanya dalam aspek ekologis tetapi juga sosiologis—berbasis masyarakat. Indonesia memiliki lahan gambut dengan luas lahan 22,5 juta hektar (Global Wetlands 2019)—termasuk di dalamnya konsesi perusahaan. Berdasarkan data *Global Wetlands* (Februari 2020), provinsi pemilik lahan gambut terbesar di Indonesia adalah Papua dengan luas 6,27 juta ha, disusul kemudian Kalimantan Tengah (2,69 juta ha),

Riau (2,22 juta ha), Kalimantan Barat (1,78 juta ha) dan Sumatera Selatan (1,73 juta ha) (lihat Tabel 1). Kawasan gambut yang luas ini juga menjadi habitat dari hewan, tumbuh-tumbuhan, dan juga masyarakat yang hidup di sekitar kawasan lahan gambut. Sehingga keberadaan lahan gambut tidak hanya memiliki konsekuensi ekologis bagi alam, tetapi juga konsekuensi sosial, ekonomi, bahkan politik, bagi masyarakat, khususnya mereka yang hidup di sekitar kawasan lahan gambut.

Tabel 1. Luas Lahan Gambut per Provinsi

Provinsi	Luas Lahan Gambut (ha)
Papua	6,274,046
Kalimantan Tengah	2,691,885
Riau	2,220,890
Kalimantan Barat	1,789,448
Sumatra Selatan	1,731,766
Kalimantan Selatan	562,401
Jambi	477,417

Sumber: Global Wetlands (2020)

Lahan gambut hanya mencakup sekitar 3% dari permukaan tanah dunia, tetapi menyimpan setidaknya dua kali lebih banyak karbon dari semua hutan yang ada di Bumi (Joosten 2007; Agus & Subiksa 2008). Salah satu sifat yang menjadikan gambut berperan penting dalam sistem hidrologi adalah kemampuannya bertindak seperti spons besar yang menampung air. Di musim hujan, lahan gambut dapat berfungsi untuk mencegah banjir, kemudian pada musim kemarau, lahan rawa gambut dapat menyediakan cadangan air untuk masyarakat yang tinggal di sekitarnya (Wahyunto et al. 2004). Lahan gambut adalah rumah bagi keragaman hayati, air bersih, dan berfungsi sebagai spons raksasa yang dapat mencegah banjir dan perubahan iklim (IUCN 2017). Asia Tenggara menjadi kawasan pemilik lahan gambut tropis terbesar di dunia dengan luas 56% dari total lahan gambut tropis dunia.

Indonesia sendiri menyumbang 47% dari luas lahan gambut tropis dunia, membuatnya menjadi negara pemilik gambut terbesar di kawasan Asia Tenggara (BRG 2016). Sayangnya lahan gambut di Indonesia mengalami ancaman serius seperti kebakaran, pembakaran, dan alih fungsi lahan yang masif. Hilang dan rusaknya lahan gambut bukan hanya semata persoalan ekologis tetapi juga persoalan sosiologis. Kerusakan lahan gambut di berbagai wilayah di Indonesia membawa persoalan ekonomi masyarakat. Kerusakan ini terjadi setidaknya karena dua hal. Pertama, kebijakan pembangunan yang bias terhadap alam ditandai sejak *mega rice project* era Soeharto. Kedua, tata kelola lahan gambut yang tidak berkelanjutan baik oleh negara maupun masyarakat (Indirastuti & Pratiwi 2019). Menurut Vandana Shiva pembangunan seharusnya mendatangkan kesejahteraan alih-alih menghadirkan penderitaan baru dalam bentuk kemiskinan. Pembangunan yang bertumpu pada eksploitasi alam akan secara langsung berdampak pada penghidupan perempuan (Shiva 1988).

Di Indonesia, aksi-aksi pemertahanan lingkungan di tingkat lokal dilakukan oleh institusi negara, individu, maupun kolektif—atau dalam konsep yang lebih luas disebut sebagai gerakan sosial. Dalam konteks pemulihan lahan gambut di Indonesia, agenda restorasi lahan gambut secara formal-institusional menjadi tanggung jawab Badan Restorasi Gambut. Pada 6 Januari 2016, Presiden RI menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) sebagai lembaga non-struktural yang bertanggungjawab kepada Presiden, di bawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. BRG dimandatkan untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi 2.492.523 hektar lahan gambut di tujuh provinsi prioritas, yakni Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan dan Papua hingga tahun 2020. Dari hasil intervensi BRG, dipetakan bahwa ada 31 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di 7 provinsi, yakni 7 KHG di Riau, 4 KHG di Jambi, 5 KHG Sumatra Selatan, 5 KHG Kalimantan Barat, 5 KHG Kalimantan Tengah, 4 KHG Kalimantan Selatan, dan 1 KHG Papua (BRG 2019).

BRG mengusung konsep restorasi lahan gambut yang tidak hanya memulihkan tanah dalam arti ekologis-geologis tetapi juga memulihkan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem lahan gambut. Maka, salah satu misi BRG adalah menggalang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan restorasi gambut. Model pelibatan masyarakat dalam restorasi lahan gambut ditargetkan dapat membawa manfaat dan perubahan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mewujudkan pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan. Dalam menjalankan tugasnya, BRG bekerjasama dengan lembaga mitra, salah satunya adalah Kemitraan.

Guna merespons situasi kerusakan ekologis gambut secara ekologis dan sosial, BRG bersama dengan mitranya mengembangkan program yang disebut

Desa Peduli Gambut (DPG). Melalui DPG, pengelolaan lahan gambut berkelanjutan di tingkat desa terintegrasi dalam kebijakan. Desa Peduli Gambut adalah kerangka program untuk intervensi pembangunan pada desadesa/kelurahan di dalam dan sekitar Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), yang menjadi target restorasi gambut. Hingga tahun akhir tahun 2018, telah terbentuk 75 Desa Peduli Gambut dengan dampingan fasilitator desa di masing-masing desa (BRG 2019).

Laporan yang dirilis BRG pada tahun 2016, menyebutkan setidaknya ada 10.465 desa yang berada di Kawasan gambut—tersebar di pulau Sumatra, Kalimantan, dan Papua. Artinya ada banyak masyarakat desa yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut (lihat tabel 2).

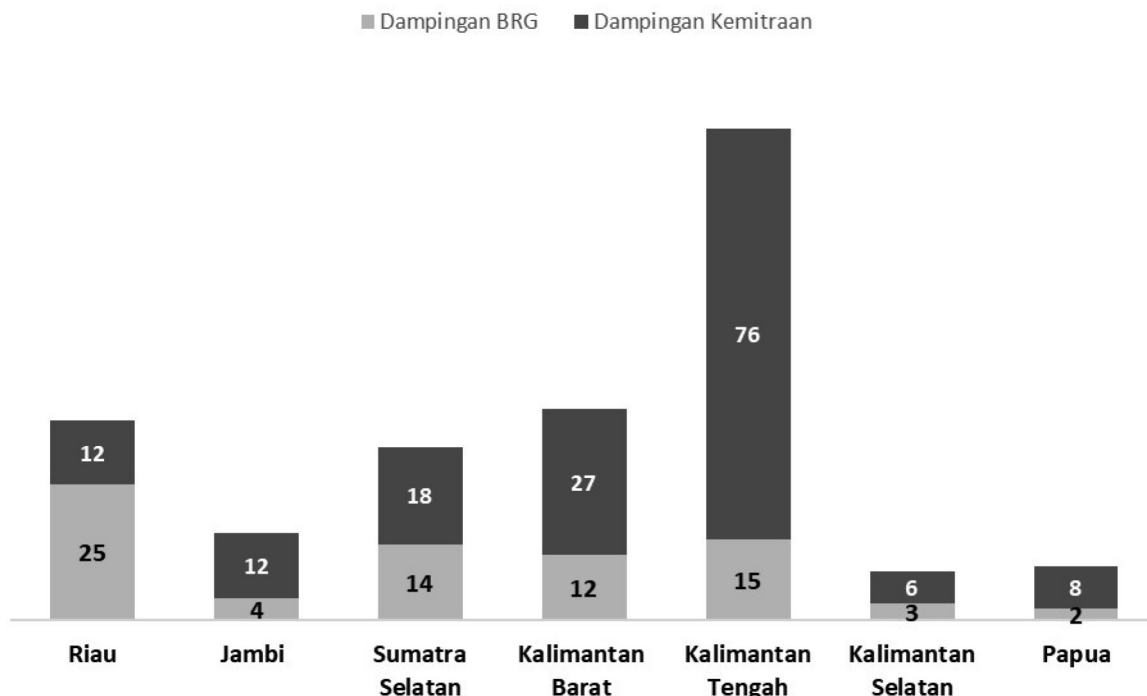
Tabel 2. Jumlah Desa di Kawasan Gambut

Pulau	Luas lahan gambut (ha)	Jumlah desa di Kawasan gambut
Sumatra	5,965,220	5.011
Kalimantan	5,036,164	2.990
Papua	4,931,054	2.464
Total	15,932,438	10.465

Sumber: BRG 2016

Lebih jauh, dalam konteks program Desa Peduli Gambut (DPG), total desa dampingan BRG sebanyak 75 desa. Kemudian, jumlah DPG dampingan Kemitraan sejak tahun 2018 adalah sebanyak 109 desa, namun di awal

tahun 2020 ada penambahan jumlah desa dampingan sebanyak 50 desa, sehingga total dampingannya sebanyak 159 desa.

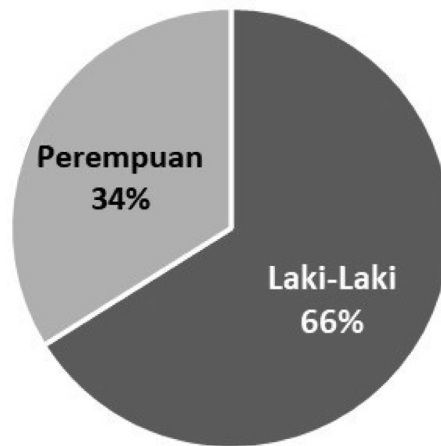


Grafik 1. Jumlah DPG Dampingan BRG dan Kemitraan per Provinsi

Sumber: Diolah dari data BRG dan Kemitraan (April 2020)

Salah satu infrastruktur Desa Peduli Gambut ialah fasilitator desa (fasdes)—yang bertugas memfasilitasi masyarakat desa dalam proses restorasi gambut berkelanjutan. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah fasilitator desa yang bertugas menjalankan program

DPG di desa dampingan BRG adalah 27 perempuan dan 48 laki-laki. Sedangkan untuk fasilitator desa-desa dampingan Kemitraan, dari total 108 desa, 35 perempuan dan 73 laki-laki. Maka perbandingan fasdes yakni 66.1% laki-laki dan 33.9% perempuan.



Grafik 2. Fasilitator Desa Peduli Gambut Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Diolah dari data BRG dan Kemitraan (April 2020).

Fasdes merupakan kepanjangan tangan program Desa Peduli Gambut yang bekerja di tingkat tapak. Fasdes memfasilitasi, mengorganisir diskusi, mendorong kepedulian, dan mengajak keterlibatan masyarakat desa dalam aksi restorasi gambut berkelanjutan. Pendekatan program DPG melalui 'pintu' UU Desa, karena itulah fasdes sebelum ditempatkan di desa telah dibekali dengan pemahaman seputar perencanaan dan kebijakan pembangunan desa. BRG melalui fasdes mendorong Pemerintah Desa dan masyarakat agar muatan restorasi gambut dapat masuk dalam kebijakan perencanaan dan pembangunan desa. Memfasilitasi disusunnya Peraturan Desa tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG), penguatan kelembagaan BUMDes, serta mengawal Musyawarah Desa dalam penyusunan RKPDes, adalah sebagian dari tugas Fasdes (BRG 2019).

Terdapat 10 kegiatan dalam Program Desa Peduli Gambut mencakup: (1) Pendampingan dan Penempatan fasilitator desa/kelurahan; (2) Pemetaan sosial dan pemetaan partisipatif pada wilayah kelola gambut masyarakat; (3) Fasilitasi perencanaan desa dengan memasukkan aspek perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut; (4) Fasilitasi pembentukan kawasan perdesaan gambut di lanskap Kesatuan Hidrologis Gambut prioritas restorasi; (5) Penguatan kelembagaan melalui fasilitasi pembentukan peraturan di tingkat desa dan kelompok masyarakat peduli gambut; (6) Fasilitasi

pengembangan inovasi lokal dan teknologi tepat guna; (7) Pemberdayaan ekonomi melalui fasilitasi peningkatan keterampilan, kelembagaan ekonomi seperti Badan Usaha Milik Desa; (8) Fasilitasi kapasitas resolusi konflik masyarakat; (9) Fasilitasi perolehan legalitas hak dan akses masyarakat melalui Perhutanan Sosial atau Reforma Agraria; (10) Penguatan kapasitas pemantauan restorasi gambut oleh masyarakat (BRG 2019).

Dari persentase di atas, jumlah keterlibatan perempuan sebagai fasilitator desa di lahan gambut lebih dari 30%. Dalam kajian politik representasi feminis, kehadiran perempuan (dalam penelitian ini yang dalam penelitian ini disebut fasilitator desa) diasumsikan atau diharapkan dapat membawa perubahan bagi perempuan lain. Dari uraian tugas dan fungsi fasilitator desa di atas, terlihat jelas bahwa fasdes memiliki peran kunci terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu program. Dengan argumen tersebutlah penelitian ini kemudian disusun untuk mengenali lebih jauh peran perempuan fasdes program Desa Peduli Gambut bagi pemberdayaan perempuan di desa gambut. Mengapa perempuan fasilitator desa menjadi fokus utama, sebab dalam banyak program pembangunan dan pemberdayaan dari atas ke bawah (*top-down*), indikator keberhasilan cenderung diukur dari capaian program semata dan cerita-cerita dari bawah serta kisah perjuangan aktor kunci implementasi program seperti fasdes hampir

tidak pernah terungkap. Penelitian ini hendak memberi ruang bagi narasi perempuan fasdes sebagai salah satu aktor kunci pemberdayaan ekonomi perempuan di desa gambut.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berfokus pada perempuan fasilitator desa sebagai subjek penelitian. Penelitian dilakukan di 3 Desa Peduli Gambut di Provinsi Kalimantan Tengah yakni Desa Jabiren, Desa Tumbang Nusa, dan Desa Gandang Barat. Desa tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian karena didampingi oleh perempuan fasilitator desa dan telah mengalami perubahan dalam arti kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan di desa-desa tersebut telah dikategorikan berhasil. Pemilihan desa dengan kriteria tersebutlah yang menjadi dasar pemilihan fasdes sebagai subjek penelitian—ketertarikan antara desa dan fasdes tidak bisa dilepaskan satu sama lain.

Penelitian ini menggali lebih jauh bagaimana aksi, tantangan, dan strategi yang dialami perempuan sebagai fasilitator desa dalam program Desa Peduli Gambut? Dalam penelitian ini, fokus aksi fasdes yang diteliti yakni pemberdayaan ekonomi melalui fasilitasi peningkatan keterampilan, kelembagaan ekonomi seperti Badan Usaha Milik Desa. Pertanyaan lebih lanjut ialah apakah perempuan sebagai fasdes membawa perubahan bagi perbaikan kondisi perempuan di lahan gambut? Apa saja tantangan yang dihadapi perempuan fasdes sebagai 'perempuan'? dan strategi pemberdayaan apa saja yang mereka lakukan?

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan kajian literatur. Wawancara mendalam dilakukan kepada 3 orang perempuan fasdes di masing-masing desa, 1 orang koordinator program DPG dari Kemitraan, dan 1 orang manajer unit program DPG di tingkat provinsi. Hasil pengumpulan data dianalisa menggunakan perspektif dan teori feminis dengan melihat kompleksitas situasi, pengalaman, dan hambatan yang dialami perempuan fasdes di masing-masing desa.

Aksi Perempuan Fasdes: Membangun Kemandirian Ekonomi Perempuan di Desa Gambut

Rina Septu Ningsih, sejak Juli 2018 menjadi fasdes program Desa Peduli Gambut di Desa Jabiren, Kalimantan Tengah. Selama melakukan pendampingan masyarakat Rina tinggal di sebuah rumah sewaan bersama kawan-

kawan fasdes desa lainnya. Lahir dan besar di desa transmigran dengan lahan gambut di Pulang Pisau Kalimantan Tengah, membuat Rina yang merupakan lulusan Ilmu Biologi ini tertarik bekerja menjadi fasdes desa gambut. Meskipun tidak memiliki latar belakang pendampingan masyarakat, Rina tetap mau belajar mengembangkan kapasitasnya. Selama hampir 2 tahun mendampingi masyarakat di Desa Jabiren, banyak capaian dan inovasi program yang telah ia lakukan, khususnya dalam rangka meningkatkan ekonomi kelompok perempuan.

Di Desa Jabiren, sebelum adanya kebijakan pelarangan membakar lahan gambut untuk pembukaan lahan pertanian, masyarakat masih membakar lahan. Kebijakan pelarangan membakar ini menyebabkan sebagian besar masyarakat Desa Jabiren yang sebelumnya bergantung hidup dengan pertanian merasa bahwa lahan gambut kini sudah tidak bisa ditanami lagi. Masyarakat kemudian hanya bergantung pada tanaman karet dan segon. Sebagian masyarakat lainnya, yang masih ulet bertani dengan metode tanpa bakar masih bertahan meskipun dengan biaya yang lebih besar dari sebelumnya.

Hampir 70% masyarakat Desa Jabiren pekerjaan utamanya adalah penyadap karet. Rina sebagai fasdes menjelaskan bahwa perputaran uang dari hasil menjual karet relatif cepat dibandingkan pertanian. Selain menjual karet, sebagian masyarakat juga menjual tanaman rotan dan buah-buahan lokal seperti durian dan *paken* (latin: *durio kutejensis*) sebagai tambahan pemasukan. Pasca kebakaran besar tahun 2015 di Kalimantan Tengah—yang menyebabkan sebagian kebunkebun milik masyarakat habis terbakar—hanya kebun karet yang masih bisa diandalkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Di Desa Jabiren, salah satu program Desa Gambut yang berjalan baik dan membawa dampak besar bagi perempuan yakni, program revitalisasi ekonomi. Rina Septu sebagai fasdes mengajak para perempuan muda dan perempuan berusia 40 tahun ke atas untuk melestarikan pengetahuan menganyam dari nenek moyang. Para perempuan muda dan paruh baya ini saling bertukar motif anyaman dan belajar dari para penganyam yang lebih tua. Rina mengembangkan program pelatihan menjahit dan menganyam rotan bekerjasama dengan Bumdes. Program pelatihan ini terdiri dari 3 kegiatan, yakni 1) pelatihan menganyam rotan, 2) pelatihan menjahit tas anyaman rotan, 3) pelatihan menganyam untuk anak muda di desa. Selain untuk meningkatkan keahlian menganyam, kegiatan ini

juga menjadi ruang bagi perempuan desa untuk saling bertukar pengetahuan motif anyaman.

Jadi desa Jabiren ini, desa lokal bukan desa transmigran. Ibu-ibu usia 40 tahun keatas secara umum bisa menganyam. Karena sudah lama gak nganyam jadi memang sisa tinggal beberapa saja orang yang aktif menganyam. Sisanya nenek-nekek 50 ke atas ada yang 70 tahun yang aktif menganyam. Ibu-ibu di sini senang ada pelatihan-pelatihan, karena merasa terbantu. Selama ini upah jahitnya anyaman rotan memang mahal, di sini sudah ada pengusaha jahit anyaman rotan juga. Tapi kami di sini bantu ibu-ibunya agar bisa jahit sendiri sehingga biaya produksinya lebih murah. (Rina Septu 2020, wawancara 6 April)

Desa Jabiren adalah salah satu desa penghasil anyaman rotan. Namun, menurut Rina masih sangat sedikit perempuan yang melakukan aktivitas ini. Padahal, tanaman rotan untuk bahan anyaman dapat diperoleh dari kebun masyarakat sendiri. Tugas mengambil tanaman rotan ini dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Mereka yang hendak mengambil rotan harus menyebrangi berenang sungai Kahayan—biasanya dilakukan oleh laki-laki. Kemudian, perempuan membersihkan rotan, dan kemudian menjualnya ke pasar atau pengusaha anyaman rotan di desa. Rantai produksinya anyaman rotan ini dimulai dari para nenek-nenek yang menganyam rotan. Para nenek ini tidak mengambil rotan mereka sendiri, sebagian membeli dari tetangga, dan lainnya diambilkan oleh anggota keluarga yang masih sehat. Kemudian anyaman dengan berbagai motif tersebut dibeli oleh pengusaha untuk dihajit dan dibentuk menjadi berbagai rupa tas, dompet, keranjang dll. Produk anyaman ini kemudian dijual dengan harga Rp 100.000 hingga Rp 500.000 tergantung jenis produknya. Artinya perempuan tidak memproduksi anyaman rotan sendiri, ada rantai produksi yang panjang, sehingga keuntungan perempuan desa pun sedikit.

Dalam program pelatihan menganyam ini, para perempuan diajarkan untuk dapat memproduksi anyaman rotannya sendiri. Sehingga rantai produksi anyaman rotan dapat mereka kuasai, mulai dari mengambil bahan baku, menganyam, menjahit, hingga menjual. Menurut Rina, program ini belum memberikan pengaruh ekonomi yang signifikan pada perempuan sebab keuntungannya masih sedikit dan masih digunakan untuk modal awal. Namun bagi Rina, ada perubahan pola pikir di kalangan masyarakat desa gambut tentang pentingnya melestarikan pengetahuan menganyam rotan. Sebelumnya mereka merasa tidak terlalu penting untuk belajar berbagai motif anyaman. Namun kini mereka sadar bahwa pengetahuan tentang

motif anyaman itu ternyata menghubungkan mereka dengan sejarah nenek moyangnya. Dalam proses pelatihan ini, Rina juga mendokumentasikan berbagai motif anyaman. Lebih dari 30 motif anyaman telah Rina arsipkan. Menurutnya beberapa nenek-nenek yang menganyam sudah lupa nama, makna, dan arti dari motif mereka. Jadi sebagian dari mereka sudah tidak bisa menjelaskan makna sebagian motif anyaman.

Pelatihan menganyam ini dilanjutkan dengan pembentukan unit usaha yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Nama unit usaha tersebut adalah Jawetabela. Para perempuan anggota kelompok usaha ini sepakat bahwa sebanyak 10% dari hasil keuntungan dari penjualan produk anyaman ini disumbangkan untuk kegiatan restorasi gambut di desa, sedangkan sisa keuntungan akan dikelola unit usaha.

Jadi desa menyediakan mesin jahit untuk para perempuan. Jadi mereka menjahit di desa. Desa juga menjual perlengkapan pendukung lainnya untuk membuat produk anyaman seperti puring, seleting, kain, bahan kulit, kancing dll. (Rina Septu 2020, wawancara 6 April)

Kegiatan revitalisasi ekonomi melalui pengembangan usaha anyaman rotan ini tak hanya membawa dampak positif terhadap ekonomi perempuan dan pelestarian pengetahuan perempuan di desa gambut, tetapi juga membawa perubahan praktik keadilan gender di dalam rumah. Hasil dari pemantauan program oleh Rina sebagai fasdes, ia menemukan bahwa ada perubahan relasi antara laki-laki dan perempuan di tingkat rumah tangga.

Kegiatan utama para perempuan ini kan menyadap karet di kebun bersama suaminya. Nanti setelah pulang dari kebun, mereka berdua bekerjasama mengambil rotan. Suaminya mengambil rotan. Nanti kalau sudah dibersihkan dari duri rotan, istrinya yang menjemur dan membelah rotan. Proses mengikis dibantu suaminya. Lalu istrinya akan menganyam rotan tersebut. (Rina Septu 2020, wawancara 6 April)

Sebelum ada kegiatan pelatihan menganyam ini, mengolah rotan adalah kegiatan sampingan masyarakat desa karena dianggap tidak menghasilkan nilai ekonomi yang signifikan. Kegiatan sampingan dan tidak memiliki nilai ekonomi ini dianggap oleh masyarakat. Aktivitas mengambil rotan pun bukan aktivitas utama masyarakat di sana, baik laki-laki maupun perempuan. Kini setelah adanya pelatihan, laki-laki lebih giat mengambil rotan untuk kemudian dianyam oleh perempuan. Ada kesadaran bahwa rotan bisa memiliki nilai ekonomi tinggi. Di sini terlihat ada Kerjasama antara laki-laki dan perempuan.

Febrianti, fasdes perempuan di desa Tumbang Nusa sejak Maret 2019. Sebelum menjadi fasdes program Desa Peduli Gambut, Febri telah memiliki pengalaman 5 tahun bekerja sebagai fasdes untuk berbagai program pembangunan. Selama menjadi fasdes di Desa Tumbang Nusa, ia harus menempuh jarak 35 km dengan waktu tempu sekitar 30 menit untuk bolak-balik dari rumahnya ke desa.

Sama halnya dengan Desa Jabiren, Desa Tumbang Nusa ini merupakan desa lokal bukan desa transmigran. Masyarakatnya 99% adalah orang suku Dayak. Pada musim ikan atau saat jumlah ikan banyak, mayoritas penduduknya bekerja mencari ikan di rawa gambut dengan cara tradisional. Di samping itu, aktivitas lainnya yang mereka lakukan ialah mencari tanaman purun untuk dijual, melakukan pembibitan tanaman lokal, dan berdagang buah-buahan lokal. Desa Tumbang Nusa memiliki lahan gambut dengan ketebalan lebih dari 3 meter. Kondisi tanah di desa ini 90% adalah rawa gambut dan sisanya tanah mineral. Dengan kondisi tersebut, maka rumahrumah masyarakat desa berbentuk rumah panggung.

Hampir setiap tahunnya terjadi kebakaran di Desa Tumbang Nusa. Sebelum kebakaran besar tahun 2015, masyarakatnya masih banyak yang bertani dengan sistem ladang berpindah dan membakar untuk membuka lahan di tanah mineral. Pasca peraturan melarang membakar, masyarakat tidak lagi bertani, mereka hanya bekerja mencari ikan. Selain daripada itu, sistem Pertanian Lahan Tanpa Bakar (PLTB) pun tidak cocok diterapkan di lahan gambut yang ketinggiannya di atas 3 meter. Karakteristik rawa gambut di desa ini membuat masyarakat desa tidak bisa menggunakannya untuk menanam tanaman. Sejauh ini mereka hanya melakukan penanaman di dalam *polybag* di rumah-rumah panggung mereka. Sebab, pada musim kemarau rawa gambut bisa sangat kering sekali, sedangkan pada musim hujan rawa tertutup dengan air pasang. Tidak ada air bersih di desa ini, sehari-harinya masyarakat menggunakan air Sungai Kahayan untuk mandi, mencuci, dan konsumsi sehari-hari.

Program revitalisasi ekonomi yang dikembangkan oleh Febri di desa ini adalah pembuatan sedotan purun oleh kelompok perempuan. Febri mengungkapkan bahwa dari hasil pemetaan potensi ekonomi desa berbasis lingkungan, ada 3 sektor yang bisa dikembangkan yakni 1) sektor perikanan, 2) pengolahan purun, 3) pembibitan tanaman sayur. Febri kemudian memilih untuk mengembangkan pengolahan tanaman purun karena secara spesifik ditujukan untuk meningkatkan ekonomi kelompok perempuan. Selain itu program di

sektor perikanan dan pembibitan pun sudah banyak diintervensi oleh berbagai pemerintah desa.

Kebanyakan yang mengerjakan purun ini adalah perempuan, dengan harga jualnya masih rendah. Jadi waktu kita berpikir, bagaimana ya purun ini dapat ditingkatkan nilainya karena ini dampaknya pada kelompok perempuan dan dapat dikerjakan di sekitar lingkungan mereka. Makanya waktu itu kita buat program bagaimana meningkatkan nilai jual purun ini. (Febri 2020, wawancara 6 April)

Menurut Febri, selama ini tanaman purun yang diambil oleh perempuan di rawa-rawa gambut hanya dijual mentah tanpa diolah. Harga 1 ikat tanaman purun mentah dengan diameter 1 meter dihargai hanya Rp 4000. Padahal proses mengambil purun ini cukup berat, pertama mereka harus ke padang, kemudian berenang di rawa gambut, dan memikul purun sampai ke rumah. Pekerjaan mengambil purun dianggap pekerjaan yang tidak memiliki nilai ekonomi. Tidak mengherankan laki-laki tidak tertarik melakukannya, dan karenanya selama ini hanya dikerjakan oleh para perempuan.

Program yang difasilitasi Bumdes ini mendampingi seluruh proses pembuatan sedotan purun, mulai dari pelatihan hingga penjualan. Ada 20 orang perempuan yang ikut dalam pelatihan ini. Skema program ini adalah memberdayakan para perempuan untuk membuat sedotan purun di rumahnya masing-masing. Sedangkan pemasarannya dilakukan secara kolektif bersama dengan pemerintah desa. Dalam 1 hari, para perempuan ini bisa memproduksi 500-1000 batang sedotan purun. Produk sedotan Purun para perempuan di Desa Tumbang Nusa ini telah melintasi batas pulau bahkan negara. Febri mengatakan bahwa produk sedotan telah dijual di pasar lokal dan pasar di luar Kalimantan seperti Jawa dan Bali. Selain itu, sedotan purun ini juga dijual ke Norwegia oleh *reseller*. Sedotan ini dijual dengan Rp 10.000/1 kotak (isi 25 pcs). Namun bila membeli dalam jumlah banyak, harga sedotan purun ini Rp 20.000/100 pcs.

Setelah mengerjakan sedotan purun ini mereka bisa membeli pulsa listrik dan pulsa internet. Mereka bisa menambah kebutuhan dapur. Jadi biasanya awalnya suami mereka membiarkan mereka mencari purun sendiri ke ladang. Kini suaminya yang ke ladang, dan yang mengerjakan sedotannya adalah istrinya. (Febri 2020, wawancara 6 April)

Program pembuatan sedotan purun berdampak pada ekonomi perempuan di Desa Tumbang Nusa. Lebih jauh, peningkatan ekonomi perempuan ini berdampak pada keterlibatan laki-laki dalam membantu perempuan. Febri menceritakan bahwa sebelum ada

kegiatan produksi sedotan purun, laki-laki tidak pernah membantu perempuan ke ladang untuk mengambil purun. Namun setelah tanaman purun ini memiliki nilai ekonomi, akhirnya laki-laki mau membantu perempuan mengambil purun di ladang.

Kurnia, Fasdes Desa Gandang Barat, Kecamatan Maluku, Kalimantan Tengah sejak tahun 2018. Sebelum menjadi fasdes untuk program DPG, Kurnia telah satu tahun memberikan pendampingan wirausaha untuk desa Sebelimbing, Kabupaten Kotabaru, di Kalimantan Selatan. Program dampingan dari Kementerian Pertanian di dua Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Banjar yakni pendampingan program Upsus Pajale dan Peremajaan karet kepada petani karet. Menurut Kurnia, kerja pendampingan sebagai fasdes adalah panggilan hati. Lulus sebagai sarjana pertanian, ia mengaku memang dekat dan tertarik pada isu lingkungan dan menyukai kerja-kerja lapangan. Selama mendampingi desa tersebut Kurnia telah melakukan aksi revitalisasi ekonomi.

Mayoritas warga Desa Gandang Barat adalah transmigran. Selama 3 bulan pembuatan profil desa, Kurnia menemukan bahwa mayoritas pencaharian penduduk adalah petani tanaman pangan dan perkebunan. Kerja-kerja tersebut sudah dilakukan sejak dulu oleh masyarakat saat awal membuka lahan sampai dengan sekarang. Berdasarkan peta potensi desa, Kurnia memfokuskan program revitalisasi ekonomi pada bidang pemberdayaan ekonomi melalui kegiatan wirausaha pengolahan kopi. Menurut Kurnia, pertanian kopi telah dilakukan oleh masyarakat desa sejak 1982. Namun selama ini mereka hanya menjual kopi mentah berupa biji kopi saja tidak diolah sehingga harga jualnya pun rendah.

Di desa Gandang Barat, Kurnia memberi pendampingan pada kelompok perempuan yang terdiri dari 6 orang. Menurut Kurnia, program ini secara sadar memang ia fokuskan pada kelompok perempuan. Perempuan yang ia damping adalah perempuan berusia 25 tahun hingga lansia. Dua orang anggotanya merupakan perempuan yang sedari awal memang telah aktif dalam organisasi kemasyarakatan yakni kader Posyandu, guru PAUD dan aktif di Badan Permusyawaratan Desa (BDP), sedangkan 4 orang lainnya adalah Ibu Rumah Tangga. Menurut Kurnia, kelompok perempuan yang didampingi merasa senang dan konsisten menjalankan program tersebut. Alasannya sebab inisiatif kegiatan wirausaha tersebut memang berasal dari aspirasi para perempuan dampingan.

Program revitalisasi ekonomi yang saya lakukan memang fokusnya untuk perempuan... Dalam kegiatan revitalisasi ekonomi yang saya lakukan kebetulan anggota

kelompoknya 6 orang perempuan semua, tapi dalam kegiatan kadang-kadang suaminya ikut juga membantu. Di sini saya melihatnya tidak adanya larangan dari suami-suami mereka terhadap kegiatan di luar rumah yang dilakukan oleh ibu-ibu tersebut. Tetapi jika kita lihat kembali mulai dari kegiatan rumah sampai luar rumah maka pekerjaan perempuan itu lebih banyak porsi. (...) Untuk kesetaraan gender berpengaruh terhadap keluarganya dan desa karena mereka perempuan yang sudah terbiasa berkegiatan di luar rumah baik organisasi maupun sosial kemasyarakatan. Jadi kalau dilihat dari kesetaraan dalam pekerjaan mungkin bisa dikatakan setara. Dan untuk desa sendiri mereka juga salah satu tokoh perempuan aktif di kegiatan desa sehingga mereka mampu mempengaruhi perempuan lainnya. (Kurnia 2020, wawancara 18 April)

Kegiatan yang difasilitasi oleh Kurnia berdampak pada isu-isu kesetaraan gender di tingkat keluarga dan komunitas. Sebab dengan bergabung dalam kelompok perempuan desa, para perempuan dampingan menjadi terbiasa dalam berorganisasi dan menyatakan pendapatnya.

Dalam kegiatan desa pun, seperti organisasi desa BPD yang terlibat lebih banyak perempuan. Jadi kalau yang sekarang laki-laki 2 dan perempuan 3. Di kantor desa juga perbandingannyaimbang. (Kurnia 2020, wawancara 6 April)

Secara ekonomi, pemberdayaan yang dilakukan oleh Kurnia belum bisa diukur dampak peningkatannya pada ekonomi perempuan sebagai individu maupun dampaknya pada ekonomi keluarga. Hal ini disebabkan belum adanya penghitungan pendapatan hasil usaha yang dilakukan secara menyeluruh.

Kalau dilihat dari sisi pascapanennya yang kami lakukan menunjukkan kalau lebih besar keuntungannya jika kita jual dalam bentuk produk dibandingkan pascapanen biasa aja pengolahannya. Kalau pascapanen biasa untuk kopi, petani cuma jual biji yang mana harganya turun naik berdasarkan harga pasar, tapi kalau dikelola oleh kelompok harganya sudah tetap, sudah hitungan tetap, jadi lebih mendingan hasil produk. (Kurnia 2020, wawancara 6 April)

Sebagai ilustrasi, Kurnia menjelaskan bahwa petani bisa mendapat untung kurang lebih Rp 150.000/50 Kg biji kopi (harga fluktuatif tergantung permintaan pasar), atau setara Rp 2000 hingga Rp 3000/Kg dan/atau maksimal Rp 5000/Kg namun dengan melakukan pengolahan petani bisa mendapatkan keuntungan lebih besar.

Proses selama ini yang berjalan adalah hasil kopi petani dibeli oleh kelompok perempuan untuk selanjutnya diproses dengan cara membersihkan biji kopi petani menjadi biji kopi yang bersih untuk membuang kotoran berupa kulit kopi yang masih tersisa dari penggilingan yang selama ini tidak pernah dibersihkan oleh petani ketika

menjualnya kepada tengkulak. Pada proses pembersihan ini oleh kelompok dibagi menjadi tiga bagian yaitu biji kopi utuh, biji kopi pecah dan biji kopi campuran (2 jenis kopi yang memang sudah tercampur dan hanya dibersihkan dari kulitnya saja). Untuk penjualan biji kopi ini tergantung dari permintaan konsumen. Dari yang pernah dilakukan hasil penjualan biji kopi 50 kg keuntungan yang diperoleh Rp 100.000,- sampai Rp 150.000,- dengan maksimal keuntungan Rp Rp 3.000/kg. Tetapi jika proses pengolahannya baik dan benar maka nilai jualnya bisa lebih baik (Kurnia 2020, wawancara 18 April)

Selain pengolahan kopi pascapanen, Kurnia juga memiliki program pemetikan kopi merah. Tujuan dari program tersebut juga adalah peningkatan ekonomi



Gambar 1. Febri Memfasilitasi Pemetaan Wilayah Kelola Komunitas di Lahan Gambut

Sumber: Koleksi pribadi Fasdes



Gambar 2. Aktivitas Kurnia Mendampingi Warga Desa

Sumber: Koleksi pribadi Fasdes

Pemberdayaan ekonomi yang didorong oleh Kurnia adalah pemberdayaan ekonomi berbasis sosial. Artinya kegiatan ekonomi ini berbasis pada kepedulian pada lingkungan. Keuntungan dari program ini disisihkan juga untuk kegiatan restorasi gambut. Sebesar 10% hasil dari keuntungan usaha disisihkan untuk kegiatan perlindungan gambut. Perlindungan gambut itu sendiri dapat berupa pembibitan tanaman kopi dan peninjauan lokasi rawan kebakaran. Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Kurnia tidak lepas dari kegiatan pelestarian ekosistem gambut. Penguatan kelompok perempuan dengan demikian juga adalah penguatan keterlibatan perempuan dalam pengelolaan dan perawatan ekosistem gambut di desa.

Tantangan dan Hambatan Perempuan Fasdes: Struktural & Kultural

Dalam menjalankan program Desa Peduli Gambut, perempuan fasdes mengalami tantangan dan

masyarakat. Saat ini program tersebut dalam tahap sosialisasi, yaitu upaya mengubah cara pandang dan praktik memetik kopi yang selama ini memetik secara keseluruhan (baik yang sudah matang dan masih mentah) menjadi pemetikan khusus pada yang matang. Kurnia mencoba memengaruhi praktik pemetikan kopi dengan memberikan perbandingan harga yang lebih tinggi bila petani kopi mengikuti cara-cara yang tepat. Meskipun kegiatan pemberdayaan ekonomi melalui pengolahan kopi pascapanen tidak menjadi kegiatan ekonomi utama para perempuan dampingan namun para anggota mendapat manfaat dari kegiatan tersebut.

hambatan—struktural dan kultural. Dalam proses pemberdayaan masyarakat perempuan fasdes tidak hanya berinteraksi dengan masyarakat di desa tetapi juga pemerintah desa. Yesa Hardyanto, kordinator program DPG Kemitraan, mengatakan bahwa salah satu tantangan yang dialami perempuan fasdes yang muda dan baru lulus kuliah di lapangan ialah strategi komunikasi dengan pemerintah desa. Sedangkan menurutnya, bagi perempuan fasdes yang sudah berpengalaman relatif cukup bisa mengatasi persoalan komunikasi ini.

Tantangan komunikasi menjadi isu yang penting dalam kerja-kerja Fasdes DPG. Andi Kiki selaku

PMU Kalteng melihat bahwa hambatan yang dialami oleh Fasdes terkait komunikasi dialami secara sama baik oleh perempuan dan laki-laki. Menurut Andi, dalam pengawasannya tidak ada perbedaan sikap dari pemerintah desa dan masyarakat terhadap fasdes berdasarkan jenis kelaminnya.

Tidak ada Kepala Desa atau pemerintah desa yang meminta fasdes laki-laki. Hanya saja yang membedakan adalah perlakuan. Yang membedakan adalah bila fasdes laki-laki diterima diperlakukan seperti apa dan kalau fasdes perempuan yang diterima perlakuannya seperti apa. Perbedaan perlakuan misalkan fasdes perempuan tidak mungkin disatukan dengan keluarga yang isinya semua laki-laki. Mereka misalkan tinggal di kamar berbeda. Kalau laki-laki bisa tidur atau kumpul dengan laki-laki lain. Privasi berbeda antara perempuan dan laki-laki. (Andi 2020, wawancara 10 April).

Namun berdasarkan hasil wawancara dari tiga perempuan fasilitator desa terlihat bahwa ada tantangan dan hambatan khusus yang dihadapi perempuan fasdes. Perempuan fasdes di 3 desa ini mengalami hambatan dan tantangan bukan dari dalam dirinya sendiri, melainkan dari luar dirinya. Pertama, tantangan struktural, yakni birokrasi pemerintah desa yang lemah, minimnya partisipasi aparatur desa dalam proses-proses pemberdayaan, dan konflik kepentingan di tingkat elit desa. Kedua, para perempuan fasdes ini juga mengalami tantangan yang spesifik menyangkut identitasnya sebagai perempuan, yakni stigma dan perendahan hasil kerja.

Lemahnya Dukungan Birokrasi Desa

Fasdes di Desa Jabiren, Rina Septu, mengalami hambatan struktural karena adanya konflik kepentingan di pemerintah desa yang membuatnya harus bekerja dua kali lebih keras untuk menjalankan program Desa Gambut. Rina coba menjelaskan hambatan apa yang terjadi di lapangan sebagai berikut:

Salah satu contoh program perencanaan desa, kendalanya itu adalah minimnya kemauan dari orang-orang di situ dan konflik internal di desa sehingga program itu seperti bergantung ke salah satu orang saja. Nah disitu saya harus ngajak yang gak pernah kerja, juga mengajak orang yang menjadi kunci itu untuk mau berbagi dengan yang lain, dan terbuka dengan yang lain... Itu konflik mereka sendiri bukan dari saya. (Rina Septu 2020, wawancara 6 April)

Konflik yang terjadi antara elit desa dengan masyarakat ini membuat Rina harus menempuh jalur komunikasi yang tidak sederhana. Pasalnya bila pemerintah desa berjalan maksimal, waktu pelaksanaan program—mulai dari perencanaan hingga implementasi—dapat terukur. Bila birokrasi pemerintah desa lemah dan tidak demokratis, bukan hanya program pembangunan yang tidak berjalan tetapi juga tidak adanya kemajuan di desa.

Seperti halnya Rina, Kurnia juga mengalami tantangan di tingkat struktural. Ia mengaku pernah tidak dianggap dan diabaikan hingga 6 bulan oleh Pemerintah Desa setempat. Baik dirinya secara personal dan juga program yang ia tawarkan tidak direspons secara baik.

Penolakan dari mereka itu mulainya kapan ya. Awal saat buat profil desa mereka masih terbuka ya. Di perencanaan desanya mungkin ada yang tidak mereka sukai. Informasi yang ingin kami ketahui mereka tidak suka digali lebih dalam. (Kurnia 2020, wawancara 6 April)

Selain sempat mengalami penolakan dari kalangan Pemerintah Desa, Kurnia juga mengalami diskriminasi dari kalangan masyarakat setempat.

Ada pengalaman tidak enak misalkan pemikiran kita tidak langsung diterima oleh pemdes dan laki-lakinya. Mungkin jalur pemikirannya berbeda. Pernah juga terucap oleh masyarakat setempat “coba yang disini fasdesnya laki-laki kayaknya lebih mudah deh untuk penerimaannya daripada perempuan”. Semacam diragukan kemampuan saya karena perempuan. (Kurnia 2020, wawancara 6 April)

Kurnia mengaku bahwa penolakan yang ia alami bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi tapi dukungan dari kelompok perempuan yang ia dampingi membuat ia tetap gigih memperjuangkan program-program DPG. Pengalaman diskriminatif yang dialaminya membuat ia harus memikirkan strategi komunikasi yang berbeda.

Febri, fasdes di Desa Tumbang Nusa mengaku bahwa kepemimpinan perempuan di desa sangatlah penting. Ia menceritakan bahwa di tahun 2019 tidak ada keterwakilan perempuan sebagai aparatur desa. Hal ini membuat tidak adanya perspektif perempuan dalam pembangunan desa, sehingga tidak program-program pemberdayaan yang secara spesifik memperhatikan kebutuhan perempuan. Kemudian, di tahun 2020, kepala desa terpilih adalah perempuan. Sejak saat itu, mulai ada keterwakilan perempuan di desa dan kebutuhan perempuan desa mulai diakomodasi.

Jadi waktu 2019 itu kepala desanya laki-laki, jadi kalau saya lihat pada saat kades laki-laki waktu itu kegiatannya jarang untuk kelompok perempuan. Hampir 100 persen perangkat desanya adalah laki-laki. Tak ada satupun perempuan. Jangankan untuk program perempuannya, perangkatnya saja tidak ada satupun perempuan. Pilkades 2020, yang terpilih perempuan, jadi kebijakannya berbeda. Di struktur pemerintahan desa mulai ada perempuan, kemudian kebijakan terkait posyandu dan karang taruna mulai ada, susunan kepengurusan organisasi perempuan di desa mulai ada. (Febri, wawancara 6 April)

Dari narasi di atas dapat kita lihat bahwa tantangan struktural yang berada di tingkat desa mewujud secara beragam sesuai dengan karakteristik di tiap-tiap desa. Meskipun tantangan dan hambatannya berbeda-beda, namun tantangan tidak bisa dilepaskan dari dimensi gender. Lebih jauh, kita bisa lihat contoh kasus di Desa Tumbang Nusa, bahwa persoalan partisipasi

dan keterwakilan perempuan di lembaga pengambil keputusan juga menjadi salah satu faktor lemahnya atau lambannya kegiatan pemberdayaan perempuan di desa.

Kerentan Stigma terhadap Perempuan Fasilitator Desa

Selain tantangan struktural, perempuan fasdes juga mengalami tantangan kultural di tingkat masyarakat. Tantangan berbasis gender yang dialami perempuan fasdes ialah dibicarakan atau menjadi bahan pembicaraan dalam konteks negatif. Pandangan bias terhadap perempuan ini masih kuat di masyarakat desa.

Kalau saya pribadi masuk ke kelompok ibu-ibunya itu lebih mudah karena saya juga perempuan. Kalau untuk berinteraksi dengan laki-laki saya membatasi diri agar tidak menjadi gosip. Kalau di desa bisa jadi gosip kalau kita tidak bisa membatasi diri kita dengan laki-laki yang ada di desa. (Febri 2020, wawancara 6 April)

Seperti yang dialami oeh Febri, dalam menjalankan program DPG, Kurnia juga mengalami tantangan dalam hal berkomunikasi dengan laki-laki. Pandangan masyarakat yang bias membuat dirinya harus berstrategi dalam melakukan kerja-kerja pendampingan.

Kalau saya sebagai fasdes perempuan hambatannya komunikasi dengan laki-laki. Apalagi saya belum menikah ya. Kalau sudah menikah mungkin tidak apa-apa. Kalau belum menikah kan takutnya akan menimbulkan keceburuan untuk istrinya karena kita sering ketemu ya meskipun yang dibicarakan dengan bapaknya mengenai program. (Kurnia 2020, wawancara 6 April)

Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan pada 3 Fasdes perempuan ini tampak jelas bahwa budaya patriarki memengaruhi cara berpikir dan bersikap masyarakat desa. Ada kesamaan sikap antara kelompok birokrat dan masyarakat desa yakni keduanya masih bias gender dan meragukan kapasitas perempuan.

Tantangan struktural dan kultural yang dihadapi perempuan fasdes berakar dari sistem patriarki, karena merupakan sebuah sistem maka cara pandang yang patriarkis bisa dipraktikkan oleh laki-laki maupun perempuan. Sistem patriarki ini membentuk struktur sosial dimana posisi perempuan lebih rendah daripada laki-laki, dan perempuan selalu menjadi objek eksploitasi dan penindasan (Walby 1990)—bahkan dalam hal yang paling sederhana yakni meragukan kemampuan perempuan fasdes. Di ruang publik, sistem patriarki ini termanifestasi dalam beragam bentuk, mulai dari stigmatisasi terhadap tubuh perempuan, hingga

minimnya representasi perempuan di struktur birokrasi desa.

Strategi Perempuan Fasdes: Mengambil Alih Ruang

Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan aktivismenya, perempuan Fasdes juga berstrategi. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai aksi non-birokrasi yang dilakukan perempuan fasdes. Rina Septu memahami bahwa ada birokrasi di desa yang lemah sehingga menjadi hambatan bagi implementasi program. Untuk mengatasi hal tersebut, Rina Septu mempelajari cara kerja pemerintahan desa dan menyusun strategi untuk menjalankan programnya. Pertama, Rina aktif berkomunikasi dengan staf kepercayaan kepala desa. Kedua, Rina tidak terlibat dalam pusaran konflik kepentingan di desa.

Karena kepala desanya itu susah ditemui dan jarang ke kantor, saya strateginya pegang orang kepercayaan kepala desa, terus kemudian kalau saya mau nemuin itu di rumahnya nunggu malam, abis maghrib biasanya beliau ada di rumah. Jadi kordinasi dengan tangan kanannya saja... saya fasilitator ini, tapi saya juga tidak mau intervensi konflik mereka biar saja mereka yang selesaikan. (Wawancara Rina Septu 2020)

Berbeda dengan Rina di Desa Jabiren, Febrianti di Desa Tumbang Nusa justru aktif bergaul dan bertemu dengan perempuan dan masyarakat di luar waktu kunjungan formalnya. Menurut Febri langkah ini dapat mempererat hubungan emosional dirinya dengan masyarakat desa. Dengan demikian Febri dapat mengetahui kultur masyarakat di desa dengan lebih baik.

Saya ini kan orang lokal juga, jadi kalau interaksi dengan masyarakat tidak terlalu sulit. Jadi saya sering hadir di kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh ibu-ibu di desa. Misalnya, kita hanya sekedar main bola voli, ngobrol-ngobrol, hadir di acara perkawinan. (Wawancara Febri, wawancara 6 April)

Dalam hal mengatasi dan meminimalisir komentar-komentar negatif dari masyarakat tentang dirinya, Febri berusaha untuk menjaga interaksinya dengan laki-laki yang sudah menikah. Ibu dari dua orang anak ini juga berusaha berinteraksi aktif dengan istri-istri kolega kerjanya lintas organisasi.

Misalnya kalau kita pergi-pergi itu jangan minta tolong sama suami orang. Atau kalau kita misalnya punya pekerjaan dengan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang kebanyakan laki-laki kita juga harus akrab dengan istri mereka supaya tidak ada kecurigaan. (Wawancara Febri, wawancara 6 April)

Seperti halnya Febri, Kurnia juga berstrategi agar tidak terlibat konflik dengan masyarakat sekitar, ia berusaha untuk menjaga intensitas interaksinya dengan laki-laki yang sudah menikah dan memperkuat dukungan dari kelompok perempuan.

Sejak awal saya sudah membatasi diri. Supaya tidak terjadi hal yang tidak menyenangkan... pertemanan saya ditingkat desa lebih ke perempuannya ya karena mereka lebih terbuka. Jadi strateginya dengan lebih menguatkan dukungan dari sesama perempuan ya... Kalau dukungan dari masyarakat, organisasi ada ya. Dari kelompok usaha ibu-ibu yang saya damping sekarang. Mereka alasan saya tetap bertahan yaa sampai sekarang. (Kurnia 2020, wawancara 6 April)

Dalam menjalankan program Desa Peduli Gambut, Kurnia mengajak perempuan berdiskusi dan berbicara tentang masalah dan/atau potensi yang ada di desa. Kurnia jarang sekali melakukan komunikasi dengan orang banyak secara bersamaan. Ia memilih jalan komunikasi secara personal dari rumah ke rumah untuk mendengarkan masalah apa saja yang dialami masyarakat desa. Menurutnya, dengan strategi demikian, ia dapat merumuskan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok perempuan. Kurnia tidak memberikan jarak antara dirinya dengan perempuan di desa gambut. Meski bukan dalam forum-forum formal, strategi yang dilakukan Kurnia sebagai fasdes berhasil dalam mendorong perubahan.

Perempuan Sebagai Aktor Kunci Pemberdayaan: Membuka Akses, Merebut Kekuasaan

Narasi perempuan fasdes dalam melakukan aksi restorasi gambut di Desa Peduli Gambut via program revitalisasi ekonomi, menunjukkan makna pemberdayaan perempuan sesungguhnya. Lebih jauh, apa arti atau makna dari pemberdayaan perempuan ini? Apakah ini hanya sekadar meningkatkan pemasukan, atau tambahan uang yang lebih besar dari sebelumnya, atau hanya meningkatkan keahlian, kesibukan atau relasi dengan banyak orang atau kelompok dan asosiasi? Lebih dari itu, kegiatan ekonomi yang dikembangkan oleh perempuan fasdes memiliki perspektif gender dan lingkungan yang politis.

Pemberdayaan perempuan pada dasarnya berbicara soal bagaimana perempuan memiliki akses dan kontrol atas sumber daya, dan ini sangat berkelindan dengan apa yang disebut sebagai kekuasaan (*power*). Perebutan dan persaingan yang keras dalam mengendalikan, bahkan mengeksploitasi sumber daya, mulai dari aset tanah dan hutan, teknologi, komunikasi dan sumber daya manusia

kerap terjadi. Ini yang diartikan sebagai perebutan kekuasaan.

Pembicaraan mengenai akses pada dasarnya merujuk pada kesempatan untuk memanfaatkan sumber-sumber untuk keuntungan yang lebih besar. Akses, langsung maupun tidak, akan merefleksikan aturan-aturan dan norma-norma yang mengelola distribusi atau pembagian dan pertukaran dalam arena-arena kelembagaan yang berbeda. Sementara itu di sisi yang lain, pembicaraan mengenai kontrol atau pengawasan sangat berkaitan dengan kemampuan untuk memilih atau mendefinisikan bagaimana dan untuk tujuan apa ini digunakan, dan bahkan juga untuk mengenakan pilihan dan definisi tersebut kepada pihak-pihak lainnya. Dengan kata lain, bicara mengenai kontrol atau pengawasan berjalan seiring dengan kekuasaan. Masalahnya kekuasaan bisa menjadi positif maupun negatif sangat bergantung pada tujuannya (JASS 2012).

Selama ini ada semacam mitos yang sudah umum dipahami banyak orang, bahkan oleh sebagian besar kalangan pengambil kebijakan, akademisi, intelektual maupun aktivis masyarakat sipil. Apa itu? Banyak upaya dan kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki akses kalangan perempuan pada sumber daya alam, tapi fokusnya hanya membuat sumber-sumber itu bisa didapat atau diraih kalangan perempuan dan menyediakan "kesetaraan dalam kesempatan" (*equality of opportunity*) (JASS 2012). Namun, apakah akar masalahnya teratasi dengan pemahaman mitos seperti ini? Sayang sekali jawabannya tidak. Sederhana saja karena pemahaman seperti ini biasanya gagal untuk membetulkan atau memperbaiki adanya diskriminasi. Sebab, masyarakat atau anggota-anggota masyarakat, atau lebih khususnya laki-laki dan perempuan, tidak berada dalam posisi yang sama dalam mengambil keuntungan dari kesempatan yang diberikan, dan ini sangat berkaitan dengan norma-norma sosial yang berlaku dan kurang beruntungnya secara historis. Dalam pandangan Shiva, pembangunan atau proses-proses ekonomi yang berlangsung secara spesifik mengabaikan pengetahuan, pengalaman, dan partisipasi perempuan dan alam (Shiva 1998).

Pada titik ini pembicaraan kemudian langsung diarahkan pada kekuasaan (*power*). Di balik segala pertanyaan mengenai ketidaksetaraan, eksploitasi dan penindasan, semua ini sangat berkaitan dengan dinamika kekuasaan (*power*) dan hak-hak istimewa (*privilege*). Kekuasaan sendiri secara sederhananya dipahami sebagai tingkat kontrol atas sumber-sumber material, manusia, intelektual dan finansial yang digunakan atau dipromosikan oleh segmen-segmen

dalam masyarakat yang berbeda. Dikatakan dengan cara lain, kekuasaan sifatnya dinamis atau bertenaga yang beroperasi dalam hubungan-hubungan sosial, ekonomi dan politik diantara individu-individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat dan negara, dan kekuasaan ini digunakan bisa untuk tujuan-tujuan positif maupun negatif (Cornwall 2016).

Sampai di sini ada baiknya merujuk apa yang dikatakan kalangan feminis Barat sebut saja nama-nama seperti Kate Millet, Shulamith Firestone dan Marilyn French. Dengan penjelasan yang kurang lebih sejalan di antara mereka, mereka melihat kekuasaan selama ini lebih menampilkan wajah yang sangat maskulin dan penuh nuansa negatif (Tong 2009). Mengapa demikian? Karena kebanyakan orang memahami kekuasaan dalam pengertian "power over" yakni kemampuan untuk mengontrol dan membuat keputusan untuk banyak orang, dengan atau tanpa persetujuan dari mereka yang terkena dampak dari kekuasaan tersebut. Cirinya yang dominan adalah otoritatif, mengontrol atau menguasai dalam rangka memaksakan kehendak, tidak peduli dengan situasi dan kondisi nyata yang dialami masyarakat, dan biasanya memang hanya mementingkan kepentingan-kepentingan jangka pendek. Wujud nyatanya dari kekuasaan semacam ini bisa destruktif dan opresif yang dilestarikan melalui ancaman atau penggunaan kekerasan.

Padahal jika merujuk pada apa yang dikatakan Jean Bethke Elshtain misalnya, kekuasaan harusnya tampil dalam format "power to" yaitu kekuasaan untuk menjalankan kebaikan dan kebajikan bersama, dan di sini kekuasaan memiliki nuansa positif. Lebih jauh lagi kekuasaan bisa bermakna "power within" dalam arti diri dan agensi, dan "power with" yaitu kekuasaan kolektif atau kekuasaan dari sejumlah orang yang dibangun atas dasar alasan-alasan dan solidaritas bersama (Cornwall 2016; Rowlands 1997). Hal ini ditunjukkan bahwa kehadiran perempuan fasdes membawa perubahan bagi perempuan lain di desa lahan gambut. Perempuan fasdes menjadi kunci atas aksi kolektif perempuan di tingkat lokal.

Kehadiran perempuan fasilitator desa menjembatani aksi revitalisasi ekonomi dan restorasi gambut yang berperspektif gender. Dalam kajian politik feminis misalnya kita mengenal istilah politik representasi yang mendorong agenda perwakilan yang tujuannya untuk memajukan kelompok yang diwakilinya melalui kebijakan sesuai dengan kebutuhan (Pitkin 1972; Phillips 1995). Dalam konteks restorasi lahan gambut agenda ini ditambah dengan dimensi adil terhadap lingkungan. Hal

ini tergambar pada program restorasi lahan gambut yang diusung perempuan fasdes melalui revitalisasi ekonomi, yakni model ekonomi subsisten yang tidak menolak paradigma pembangunan yang maskulin. Paradigma pembangunan yang maskulin melihat lingkungan sebagai komoditas semata bukan sebagai kesatuan ruang hidup dan pusat pengetahuan.

Di Desa Jabiren aktivitas menganyam bukan hanya tentang ketahanan ekonomi keluarga, tetapi juga pengetahuan perempuan dan nilai budaya yang perlu dilestarikan dari generasi ke generasi. Aksi pemberdayaan ekonomi yang dilakukan perempuan fasdes di Desa Jabiren adalah aksi yang politis. Rina septu sebagai fasdes 1) mengajak perempuan untuk terhubung dengan pengetahuan menganyam dari nenek moyangnya; 2) meningkatkan kemampuan memproduksi anyaman rotan sehingga menguasai rantai produksinya—mulai dari mengolah bahan mentah, menganyam, menjahit anyaman, hingga pemasaran; 3) meningkatkan daya tawar perempuan melalui kemandirian ekonomi yang berdampak pada perubahan relasi gender di dalam rumah.

Di Desa Tumbang Nusa, mengolah purun sebagai sedotan adalah juga tindakan politis. Dalam kacamata ekonomi pasar kapitalistik, tanaman purun tidak memiliki nilai jual tinggi, begitupun dengan lahan gambut. Tak heran bila kebijakan pembangunan di lahan gambut bertumpu pada konsep pertanian monokultur—yakni pertanian dan perkebunan kelapa sawit. Dalam paradigma pembangunan reduksionis, tanaman-tanaman yang tidak memiliki nilai ekonomi ini dianggap limbah, mereka diabaikan dan bahkan dibuang (Shiva 1988). Namun perempuan fasdes justru mampu mengenali pengetahuan dan kebutuhan perempuan di desa gambut.

Secara ekologis, tanaman purun berfungsi untuk menjaga unsur hara di lahan gambut. Kemudian purun yang tumbuh di saluran-saluran air juga bermanfaat untuk memperbaiki kualitas air pada musim kemarau dan menyerap zat-zat beracun yang ada di dalam air, seperti besi, timbal, dan merkuri. Kandungan air yang cukup banyak di dalam purun juga bermanfaat untuk mencegah, menanggulangi, dan meminimalisasi kebakaran di lahan gambut. Melimpahnya purun di lahan gambut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membuat anyaman tikar, tas, dll. Namun sayangnya, sebagian besar perempuan di Desa Tumbang Nusa hanya mengambil purun untuk dijual kembali. Sejak didampingi oleh perempuan fasilitator desa, Febri, kelompok perempuan diberdayakan untuk mengolah purun menjadi sedotan

ramah lingkungan. Model pemberdayaan seperti ini tidak hanya melihat purun sebagai komoditas semata, tetapi juga memiliki misi ekologis yang lebih jauh, yakni mengurangi sampah plastik. Begitupun di Desa Gandang Barat dengan unit usaha pertanian dan pengolahan kopi untuk meningkatkan nilai jual komoditas kopi dengan tetap berkontribusi terhadap restorasi lahan gambut secara finansial.

Kegiatan revitalisasi ekonomi yang diusung perempuan untuk perempuan ini pun menunjukkan apa yang disebut Shiva sebagai “hidup dari sesuatu yang hidup” (Shiva 1998). Artinya setiap produksi atau komoditas yang dihasilkan dari alam tidak serta merta mematikan alam. Dengan mengolah rotan, purun, dan kopi, perempuan tidak mematikan fungsi ekologis dan biodiversitas kesatuan hidrologis gambut. Justru sebaliknya melihat lahan gambut dengan paradigma ekologiekonomi berkelanjutan.

Lebih jauh, kegiatan ekonomi ini juga membawa arti penting bagi perempuan desa yakni perubahan status ekonomi perempuan dan relasi gender di tingkat rumah tangga. Kegiatan revitalisasi ekonomi ini dapat dikatakan sebagai pemberdayaan ekonomi perempuan (*women's economic empowerment*)—yang tidak hanya terbatas pada peningkatan status ekonomi perempuan tetapi juga status hidup (Kabeer 2011). Dalam kerangka pemberdayaan Naila Kabeer, pemberdayaan adalah sebuah proses perubahan yang multidimensi. Pemberdayaan perempuan tidak hanya mengubah aspek di dalam individu perempuan saja, tetapi juga relasi perempuan dengan berbagai aspek di luar dirinya. Misalnya rasa percaya diri, identitas sosial, kemampuan untuk mempertanyakan posisi subordinat mereka, kapasitas untuk melakukan strategi, bernegosiasi dan berpartisipasi dalam perubahan sosial yang berkeadilan (Kabeer 2008; 2011). Pemberdayaan ekonomi yang digerakan oleh fasdes perempuan di desa peduli gambut telah membawa perubahan dan dampak multidimensi bagi ekonomi perempuan, lahan gambut, dan relasi gender.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa peran perempuan fasdes dalam memfasilitasi kegiatan dan agenda program Desa Peduli Gambut, membawa perubahan bagi perempuan desa, khususnya dari aspek ekonomi. Kegiatan revitalisasi ekonomi berupa 1) pelatihan dan pembangunan unit usaha anyaman rotan di Desa Jabiren; 2) pelatihan dan pembangunan unit produksi/usaha sedotan purun di Desa Tumbang

Nusa; 3) pembibitan dan pembangunan unit usaha pertanian kopi berkelanjutan di Desa Gandang Barat. Program revitalisasi ekonomi tersebut lahir dari dan untuk perempuan. Lebih jauh, ketiga program revitalisasi ekonomi tersebut tidak hanya bertujuan untuk membangun ketahanan ekonomi masyarakat desa via pemberdayaan ekonomi perempuan, tetapi juga disertai aksi politik pemertahanan lingkungan—dengan mengembangkan produk tanpa merusak alam dan menyisihkan sekian persen keuntungan unit usaha untuk aksi restorasi gambut. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam program DPG menjadi penting baik perannya sebagai fasdes maupun perannya sebagai kelompok sasaran program. Memberdayakan perempuan sama artinya dengan melindungi alam.

Meski demikian, perempuan sebagai perempuan selalu menemui hambatan dan tantangannya sendiri yang jelas berbeda dengan laki-laki. Penelitian ini menemukan bahwa perempuan fasdes mengalami 1) hambatan struktural berupa birokrasi di tingkat desa yang lemah; dan 2) hambatan kultur berupa stigma dan keraguan masyarakat terhadap kapasitasnya sebagai fasdes karena identitasnya sebagai perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai perempuan—dalam budaya patriarki dan bias gender—mereka harus bekerja dua kali bahkan tiga kali lebih berat untuk melakukan perubahan. Hambatan tersebut berakar dari sistem patriarki yang terinternalisasi di dalam diri (baik laki-laki maupun perempuan), dan termanifestasi di dalam cara pandang komunitas, dan struktur birokrasi.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada keberdayaan diri yang politis dari perempuan fasdes untuk mencari jalan keluar dalam menghadapi tantangan struktural dan kultural. Perempuan fasdes melakukan strategi pemberdayaan dengan 1) melakukan pendekatan non-formal pada pemangku kebijakan di desa dalam rangka implementasi program DPG; 2) tidak memberikan jarak antara dirinya dan kelompok perempuan yang diberdayakan, dengan terlibat dalam kegiatan-kegiatan non-formal masyarakat desa; 3) mendengarkan pengalaman dan permasalahan yang dihadapi perempuan desa satu per satu, dari pintu ke pintu dan menjadikannya sebagai pengetahuan/landasan penyusunan program. Dapat dilihat bahwa strategi pemberdayaan yang dilakukan perempuan fasdes ada pada kegiatan-kegiatan nonformal—yang mana pendekatan non-formal ini kerap diabaikan dan cenderung ditinggalkan pada proses perumusan kebijakan pembangunan maupun aksi pemberdayaan pada umumnya.

Aksi dan strategi fasdes perempuan dalam membuka akses perempuan desa terhadap sumber daya alam dan sumber ekonomi tersebut juga diikuti dengan perubahan cara pandang bias gender di masyarakat. Sejalan dengan hal itu, penelitian ini menemukan bahwa kegiatan revitalisasi ekonomi yang terjadi di tingkat desa pun membawa perubahan relasi gender di tingkat rumah tangga dan komunitas. Artinya, secara nyata kepemimpinan perempuan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan di lahan gambut membawa dampak yang berlapis bagi keadilan gender dan keadilan lingkungan.

Daftar Pustaka

- Agus, F & Subiksa 2008, *Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian dan Aspek Lingkungan*, Balai Penelitian Tanah dan World Agroforestry Centre (ICRAF), Bogor.
- BRG 2016, *Mengawali Restorasi Gambut Indonesia*, BRG, Jakarta.
- BRG 2016, *Rencana Strategis Badan Restorasi Gambut 2016-2020*, BRG, Jakarta.
- BRG 2019, *Laporan Kinerja 2018 Badan Restorasi Gambut*, BRG, Jakarta.
- Cornwall, A 2016, "Women's Empowerment: What Works?", *Journal of International Development*, h. 342–359, 2016, Wiley Online Library, DOI: 10.1002/jid.3210.
- JASS 2012, *Organizing for Women's Economic Empowerment: access to resources and principles for change*, diakses pada 15 April 2020
- <https://justassociates.org/en/resources/organizing-womens-economic-empowerment-accessresources-and-principles-change>
- Indirastuti, C & Pratiwi A 2019, "Ketika Lahan Basah Meringing: Kajian Ekologi Politik Feminis Degradasi Ekosistem Gambut di Kalimantan Tengah dan Selatan", *Jurnal Perempuan*, Vol. 24 No. 4, YJP Press, Jakarta.
- IUCN 2017, *Peatlands And Climate Change*, diakses pada 5 Maret 2020, <https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/peatlands-and-climate-change>
- Kabeer, N 2008, "Paid Work, Women's Empowerment and Gender Justice: Critical Pathways of Social Change", *Pathways Working Paper*, No. 3, IDS, Brighton.
- Kabeer, N 2011, "Contextualising the economic pathways of women's empowerment", *Pathways Policy Paper*, Pathways of Women's Empowerment, Brighton.
- Pitkin, HF 1972, *The Concept of Representation*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles.
- Phillips, A 1995, *The Politics of Presence*, Clarendon Press, Oxford.
- Rowlands, J 1997, *Questioning Empowerment: Working with Women in Honduras*, Oxfam, Oxford.
- Shiva, V 1988, *Staying Alive: Women, Ecology and Survival in India*, KALI FOR WOMEN, New Delhi.
- Tong, R 2009, *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction (Third Edition)*, Westview Press, US.
- Wahyunto et al. 2004, *Sebaran Gambut dan Kandungan Karbon di Sumatera dan Kalimantan*, Wetlands International, Bogor.
- Walby, S 1990, *Theorizing Patriarchy*, Wiley-Blackwell.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Dr. Andi Achdian (Universitas Nasional)
2. Dr. Widjajanti Santoso (Indonesian Institute of Sciences)
3. Dr. Irene Hadiprayitno (Leiden University)
4. Elisabet Kuswijayanti M. Si. (Indonesia)
5. Ikhaputri Widiyantini, M. Si. (Universitas Indonesia)
6. Dr. Bagus Takwin (Universitas Indonesia)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
INDONESIA
Phone/Fax: +62 21 22701689

